

Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Jawa Timur 2019-2023

Anastasya Cornelya Irawan¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2,3,4}Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Indonesia

Article Information

Received: June 25, 2025

Revised: September 1, 2025

Accepted: October 20, 2025

Published: December 15, 2025

Abstract

This study aims to analyze regional development disparities in East Java Province from 2019 to 2023 using a spatial approach based on Klassen Typology. It also examines the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita and Economic Growth Rate (EGR) on regional classification, as well as the relationship between development inequality, the Human Development Index (HDI), and poverty rate. The research employs a quantitative method with a descriptive-spatial approach. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), including GRDP per capita, EGR, HDI, and poverty rates across regencies and cities in East Java over five years. Data were analyzed using the Klassen Typology to classify regions into four quadrants (I-IV). The findings indicate that most regions fall into Quadrant III (potential to develop) and Quadrant IV (relatively underdeveloped areas). Regions in Quadrant IV typically have low HDI and GRDP per capita values and high poverty rates, such as Sampang, Bangkalan, Sumenep, and Bondowoso. In contrast, Quadrant I regions such as Surabaya City and Gresik Regency show high HDI levels and low poverty rates. These findings support Myrdal's Cumulative Causation Theory, which states that without policy intervention, advanced regions tend to grow faster while lagging regions fall further behind. Therefore, equitable region-based development policies are essential to reduce spatial disparities and enhance the overall welfare of the population.

Keywords: Development disparity, Klassen Typology, GRDP per capita, Economic Growth Rate, HDI, Poverty, Spatial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019–2023 secara spasial berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap klasifikasi wilayah, serta hubungan ketimpangan pembangunan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-spasial. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data PDRB per kapita, LPE, IPM, dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur selama lima tahun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan klasifikasi Tipologi Klassen untuk menentukan pembagian kuadran wilayah (Kuadran I–IV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada Kuadran III (wilayah potensial untuk berkembang) dan Kuadran IV (wilayah relatif tertinggal). Wilayah-wilayah dalam Kuadran IV umumnya memiliki nilai IPM dan pendapatan per kapita yang rendah serta tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Bondowoso. Sebaliknya, wilayah Kuadran I seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik menunjukkan capaian IPM tinggi dan angka kemiskinan rendah. Temuan ini memperkuat teori Cumulative Causation oleh Myrdal yang menyatakan bahwa tanpa intervensi, wilayah maju akan semakin maju dan wilayah tertinggal akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan berbasis wilayah yang lebih adil untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata kunci: Ketimpangan pembangunan, Tipologi Klassen, PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, Spasial

*Author Correspondence: Anastasya Cornelya Irawan, Muhammad Agus Muljanto

Pendahuluan

Pembangunan adalah sebuah upaya yang dilakukan demi menuju suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Siagian (2018:4) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Pembangunan daerah menjadi hal yang banyak mendapat perhatian di era otonomi daerah. Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah (Iswanto, 2015:42). Perencanaan wilayah merupakan bagian penting dari sistem manajemen perencanaan yang memiliki peranan sangat besar, perencanaan wilayah memiliki fungsi penting bagi setiap daerah dalam mencapai tujuannya yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya (Barokah, 2017:1). Perencanaan wilayah yang dilakukan secara tepat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Meskipun pembangunan nasional terus diupayakan, kenyataannya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia masih belum merata. Ketimpangan antarwilayah tetap menjadi tantangan utama, sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan dan data kemiskinan regional (Kuncoro, 2010; BPS, 2023). Ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Ketimpangan ini mengacu pada perbedaan capaian pembangunan antarwilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional atau provinsi secara agregat menunjukkan angka positif, namun distribusi hasil pembangunan belum merata dan cenderung tersentral pada wilayah-wilayah tertentu. Provinsi Jawa Timur menjadi contoh nyata dari kondisi tersebut, di mana terdapat disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah barat, tengah, dan wilayah timur-selatan provinsi.

Dalam konteks teori pembangunan, Gunnar Myrdal (1957) melalui konsep Cumulative Causation menyatakan bahwa wilayah yang maju akan terus berkembang karena efek limpahan positif (spread effect), sedangkan wilayah yang tertinggal akan semakin terpinggirkan akibat efek negatif (backwash effect). Ketimpangan ini, apabila tidak ditangani dengan intervensi kebijakan yang efektif, akan melahirkan ketimpangan struktural yang memicu kemiskinan jangka panjang. Dalam pendekatan administrasi pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2004) dan Kuncoro (2010), negara melalui peran birokrasi dan kebijakan perencanaannya harus mampu memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga merata dan adil antarwilayah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi ketimpangan adalah Tipologi Klassen, yang mengklasifikasikan wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan dua indikator utama: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Hasil analisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas wilayah

tergolong dalam Kuadran IV, yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di bawah rata-rata provinsi, yang secara spasial menunjukkan sebagai wilayah relatif tertinggal.

Contohnya pada tahun 2023, beberapa kabupaten yang berada di Kuadran IV adalah Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan Situbondo, dengan PDRB per kapita jauh di bawah rata-rata provinsi (Rp 44.423.000). Kabupaten Sampang hanya mencatat Rp 14.608.000, dan Bangkalan Rp 15.721.000. Rendahnya capaian ekonomi ini turut berdampak pada indikator pembangunan manusia.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan disparitas yang mencolok. Jawa Timur secara agregat mencatat IPM sebesar 73,20 pada tahun 2023, namun daerah seperti Kabupaten Sampang dan Bangkalan masih berada di bawah nilai 65, yang tergolong dalam kategori “sedang” menurut klasifikasi BPS. Ini mencerminkan keterbatasan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Demikian pula, tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi di wilayah Kuadran IV. Kabupaten Sampang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur sebesar 20,71%, diikuti oleh Kabupaten Sumenep (19,48%) dan Bangkalan (18,90%), yang secara signifikan berada di atas rata-rata provinsi (10,37%). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara ketertinggalan wilayah secara ekonomi dan rendahnya kualitas hidup Masyarakat.

Permasalahan ini seharusnya dapat dijawab melalui arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024, visi pembangunan

yang dicanangkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan misi salah satunya “mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah”. Visi tersebut secara tegas menyasar pada upaya mengatasi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan yang adil dan berbasis spasial. Dengan memetakan klasifikasi wilayah secara kuantitatif dan mengaitkannya dengan indikator sosial ekonomi, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata, sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji ketimpangan pembangunan menggunakan Tipologi Klassen dan pendekatan spasial. Darmawan dan Tukiman (2020) dalam Jurnal *Dinamika Governance* menganalisis ketimpangan pembangunan di Jawa Timur tahun 2014–2018 menggunakan Tipologi Klassen. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada di Kuadran IV sebagai daerah tertinggal.

Ervina Yunita (2016) dalam Jurnal *Ekonomi dan Bisnis* meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Dwiyani (2022) dalam konteks Provinsi Bali mengkaji ketimpangan wilayah dan menemukan adanya korelasi antara pertumbuhan rendah, IPM yang stagnan, dan kemiskinan yang tinggi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini menggunakan data tahun 2019–2023 dengan pendekatan longitudinal serta mengkaitkan klasifikasi spasial wilayah dengan IPM dan tingkat kemiskinan, sehingga memberikan dimensi baru dalam melihat dinamika pembangunan wilayah

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis spasial untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan BPS kabupaten/kota, yang meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat kemiskinan.

Gambar 3.1. Tipologi kelas spasial

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	Pendapatan Perkapita (y)	PDRB per kapita di Kabupaten/Kota lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur $yi < y$	PDRB per kapita di Kabupaten/Kota lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur $yi > y$
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih besar dari Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur $ri > r$		Potensial	Maju dan Tumbuh Cepat
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih Kecil dari Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur $ri < r$		Relatif Tertinggal	Maju namun tertekan

Sumber: Diadaptasi dari Kuncoro (2014:186)

Untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antarwilayah, digunakan pendekatan Tipologi Klassen yang mengelompokkan wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai PDRB per kapita dan LPE dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Kuadran I menunjukkan wilayah yang maju dan tumbuh cepat, Kuadran II adalah wilayah yang maju tetapi mengalami tekanan pertumbuhan, Kuadran III merupakan

wilayah berkembang, dan Kuadran IV adalah wilayah yang relatif tertinggal.

Langkah analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata PDRB per kapita dan LPE provinsi setiap tahun, kemudian membandingkannya dengan masing-masing kabupaten/kota. Wilayah diklasifikasikan ke dalam kuadran-kuadran tersebut sesuai hasil perbandingan. Selanjutnya, hasil klasifikasi spasial ini dianalisis keterkaitannya dengan capaian IPM dan tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif melalui tabel, grafik scatter plot, dan narasi analitis yang menggambarkan hubungan antara ketimpangan pembangunan dengan kondisi sosial masyarakat di setiap wilayah.

Periode 2019–2023 dipilih sebagai rentang waktu karena mencerminkan dinamika pembangunan dalam lima tahun terakhir yang juga selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran spasial yang utuh mengenai pola ketimpangan dan dampaknya terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan di tingkat daerah.

Hasil

Hasil klasifikasi wilayah menggunakan Tipologi Klassen tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada Kuadran III dan Kuadran IV. Wilayah yang tergolong Kuadran IV atau daerah tertinggal antara lain Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Wilayah Kuadran I hanya diisi oleh Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya.

Kuadran	Kabupaten/Kota	IPM	Kemiskinan (%)
I	Kabupaten Bojonegoro	68.75	12.38
	Kota Surabaya	82.22	4.51
II	Kabupaten Gresik	76.10	11.35
	Kabupaten Mojokerto	73.53	9.75
	Kabupaten Pasuruan	68.29	8.68
	Kabupaten Sidoarjo	80.05	5.32
	Kota Batu	75.88	3.81
	Kota Malang	81.32	4.07
III	Kabupaten Blitar	70.57	8.94
	Kabupaten Bondowoso	66.09	13.33
	Kabupaten Jember	66.69	9.25
	Kabupaten Kediri	71.85	10.42
	Kabupaten Lamongan	72.57	13.21
	Kabupaten Malang	70.35	9.47
	Kabupaten Madiun	71.69	10.54
	Kabupaten Nganjuk	71.71	11.24
	Kabupaten Ngawi	70.41	14.39
	Kabupaten Ponorogo	70.56	9.64
	Kabupaten Situbondo	67.09	11.20
	Kabupaten Trenggalek	69.46	10.98
	Kabupaten Tuban	68.37	14.58
	Kabupaten Tulungagung	72.62	6.74
	Kabupaten Pacitan	68.16	13.67
IV	Kota Blitar	78.56	7.13
	Kabupaten Lumajang	65.33	9.49
	Kabupaten Probolinggo	65.60	17.76
	Kabupaten Bangkalan	63.79	18.90
	Kabupaten Sampang	61.94	20.71
	Kabupaten Sumenep	66.22	19.48

Dalam hal capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), wilayah Kuadran IV menunjukkan capaian IPM yang cenderung rendah. Misalnya, Kabupaten Sampang memiliki IPM sebesar 61,94 dan Kabupaten Bangkalan sebesar 63,79, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 71,50. Sementara itu, wilayah-wilayah seperti Kota Surabaya (IPM 82,22) dan Kota Malang (IPM 81,32) berada pada Kuadran I dan II, dengan capaian IPM tertinggi.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 juga memperlihatkan konsistensi dengan kuadran klasifikasi. Kabupaten Sampang (20,71%) dan Kabupaten Sumenep (19,48%) yang berada di Kuadran IV menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, sedangkan Kota Batu (3,81%) dan Kota Malang (4,07%) memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.

Tahun 2020

Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 turut memengaruhi capaian pembangunan. Sebagian besar kabupaten/kota tergolong dalam Kuadran IV. Wilayah yang masih tertinggal meliputi Kabupaten

Pacitan, Ponorogo, Kediri, Jember, serta seluruh wilayah Madura. Kuadran I diisi oleh Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Kota Malang.

IPM tahun 2020 memperlihatkan tren yang stagnan atau menurun di sebagian wilayah. Kabupaten Sampang (IPM 62,70) dan Kabupaten Bangkalan (64,11) tetap menjadi wilayah dengan IPM rendah. Sementara Kota Surabaya dan Kota Malang tetap unggul dalam capaian IPM.

Tingkat kemiskinan tahun 2020 meningkat di hampir semua wilayah. Kabupaten Sampang mengalami peningkatan menjadi 22,78%, Kabupaten Sumenep 20,18%, dan Kabupaten Bangkalan 20,56%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kuadran IV tidak hanya tertinggal secara ekonomi, tetapi juga secara sosial.

Tahun 2021

Analisis Tipologi Klassen tahun 2021 menunjukkan bahwa wilayah Kuadran IV masih didominasi oleh kabupaten-kabupaten di pesisir selatan dan wilayah Madura. Sementara Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kota Malang tetap berada di Kuadran I.

Capaian IPM mengalami perbaikan tipis di sebagian besar wilayah. IPM Kabupaten Sampang naik menjadi 62,70 dan Kabupaten Bangkalan menjadi 64,90. Namun nilai tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Kemiskinan di wilayah Kuadran IV tetap tinggi. Kabupaten Sampang (22,78%) dan Kabupaten Sumenep (20,18%) masih menunjukkan kerentanan tinggi. Di sisi lain, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Madiun menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat rendah (di bawah 5%).

Tahun 2022

Klasifikasi wilayah tahun 2022 memperlihatkan pergeseran positif di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Tuban yang naik ke Kuadran III. Namun demikian, wilayah-wilayah seperti Sampang, Bangkalan, dan Sumenep masih berada di Kuadran IV.

IPM secara umum meningkat di berbagai daerah. Namun wilayah Kuadran IV tetap memiliki IPM yang rendah seperti Kabupaten Sampang (63,52) dan Kabupaten Bangkalan (64,95). Hal ini menunjukkan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di tahun ini masih tinggi di wilayah tertinggal, meskipun secara umum mengalami sedikit penurunan akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan tetap menjadi dua daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Tahun 2023

Hasil klasifikasi 2023 menunjukkan bahwa beberapa wilayah tetap bertahan di Kuadran IV, yaitu Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Wilayah-wilayah maju seperti Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo tetap menempati Kuadran I.

IPM menunjukkan peningkatan secara signifikan di beberapa wilayah, namun disparitas masih terlihat. Kabupaten Sampang masih berada pada IPM di bawah 65, sedangkan Kota Surabaya mencapai IPM di atas 83.

Tingkat kemiskinan 2023 secara rata-rata menurun, namun kesenjangan tetap terlihat. Daerah Kuadran IV menunjukkan tingkat kemiskinan di atas 15%, sedangkan Kuadran I dan II sebagian besar di bawah 6%.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019–2023 masih cukup signifikan. Dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, wilayah-wilayah dalam provinsi ini dikelompokkan ke dalam empat kuadran berdasarkan dua indikator utama yaitu PDRB per kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Secara umum, wilayah Kuadran I (maju dan tumbuh pesat) secara konsisten diisi oleh kota besar seperti Kota Surabaya dan Kota Malang. Kota-kota ini memiliki nilai PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota besar memiliki kekuatan struktural dan institusional dalam akselerasi pembangunan, memperkuat pendapat Gunnar Myrdal melalui teori Cumulative Causation bahwa daerah yang maju cenderung terus tumbuh.

Sebaliknya, mayoritas wilayah di Madura dan daerah tapal kuda menempati Kuadran IV (relatif tertinggal), seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Wilayah-wilayah ini memiliki PDRB per kapita dan LPE di bawah rata-rata provinsi. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan spasial yang menuntut intervensi melalui kebijakan afirmatif dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal.

Keterkaitan dengan IPM memperkuat temuan tersebut. Wilayah di Kuadran I dan II menunjukkan capaian IPM tinggi, menandakan ketersediaan dan aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah di Kuadran IV menunjukkan IPM yang lebih rendah dari rata-rata provinsi,

yang menandakan rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sondang P. Siagian bahwa pembangunan harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Dalam hal kemiskinan, daerah yang masuk dalam Kuadran IV umumnya memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Jawa Timur. Sebagai contoh, Kabupaten Sampang dan Bangkalan mencatat angka kemiskinan di atas 20% pada beberapa tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi secara spasial sangat erat kaitannya dengan distribusi kemiskinan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil klasifikasi Tipologi Klassen terbukti relevan untuk mendukung teori pembangunan dari Kuncoro dan Siagian, serta menjadi dasar dalam merancang perencanaan pembangunan wilayah berbasis spasial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2019–2023. Ketimpangan ini ditunjukkan melalui klasifikasi wilayah ke dalam empat kuadran, dengan sebagian besar wilayah berada pada Kuadran IV (relatif tertinggal), terutama kabupaten di wilayah tapal kuda dan Madura. Sementara itu, wilayah Kuadran

I (maju dan tumbuh pesat) seperti Kota Surabaya dan Kota Malang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi.

Capaian pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan hasil klasifikasi tersebut. Wilayah dengan klasifikasi tinggi (Kuadran I dan II) umumnya memiliki IPM yang tinggi, sedangkan wilayah di Kuadran IV menunjukkan IPM yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sosial.

Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan, wilayah dengan klasifikasi tertinggal cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Temuan ini memperkuat teori Cumulative Causation dari Gunnar Myrdal, serta relevan dengan teori administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian dan Kuncoro, bahwa ketimpangan pembangunan yang dibiarkan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa ketimpangan spasial tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap kualitas hidup masyarakat, dan menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data spasial

Referensi

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori & Aplikasi)* (1st ed.). Yogya-karta: Gava Media.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar : Metode Penelitian Kuantitatif (1st ed.)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Aslichati, L., Prasetyo, B., & Irawan, P. (2017). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Bappenas. (2020). *Laporan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barokah, N. (2017). *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Kajian Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Cilacap)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Kabupat-en/Kota di Jawa Timur*. Surabaya: BPS.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *PDRB Kabupaten/Kota Menurut Atas Dasar Harga Konstan dan ADHB 2019–2023*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Manajemen Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyani, A. N. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Bali dengan Tipologi Klassen. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(1), 45–57.
- Dwiyani, L. S. (2022). Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Bali. *Jurnal Ekonomi Regional*, 4(1), 34–48.
- Ervina, Y. (2020). Ketimpangan Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(4), 443–455.
- Evra Yunita, A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 101–112.
- Feriyanto, A., & Triana, E. S. (2015). *Pengantar Manajemen* (3 in 1) (Jarwanto). Kebumen: Mediatera.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45–58.
- Gregory, A. (2007). Planning and Managing Public Relations Campaigns. (N. Jean Cussons Typesetting, Diss, Ed.), *Journal of Experimental Psychology: General* (Ketiga, Vol. 136). Lon-don: Replika Press.
- Imelia. (2011). *Analisis Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Jambi*. Paradigma Ekonomika, 1(4), 62–72.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan*, 4(1), 41–66.
- Jefri Darmawan & Tukiman. (2020). Analisis Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2018. *Jurnal Dinamika Governance*, 10(2), 155–168.

- Klassen, J. (1960). *Typology of Regional Development*. Munich: OECD.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk agenda Pembangunan Pasca 2015. (2013). *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*. (A. Santos, Ed.). Yogyakarta: Insist Press.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. (S. Saat & W. Hardani, Eds.) (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. New York: Pantheon.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
- Siagian, S. P. (2004). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, I., & Anggara, S. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. (B. A. Saeba-ni, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Poverty and Vulnerability in Indonesia Before and After the Economic Crisis. *Asian Economic Journal*, 17(1), 45–64.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Utomo, T. W. W. (1998). *Administrasi Pembangunan (Ringkasan Materi dan Transparansi)*. (Lembaga Administrasi Negara, Ed.) (1st ed.). Bandung: Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press.

This page is intentionally left blank